

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Israel ialah salah satu diantara negara yang ada di wilayah Timur Tengah, yang eksistensinya memainkan peran penting bagi eskalasi dinamika hubungan dan konflik antar-negara. Adapun dinamika tersebut muncul sebagai akibat daripada kebijakan luar negeri Israel itu sendiri, termasuk dalam hal ini adalah kebijakan luar negeri terhadap Iran. Baik negara Israel maupun Iran telah lama menjadi pihak-pihak yang saling berseteru yang dimana hubungan adversarial antara keduanya, turut membentuk lanskap geopolitik timur Tengah yang mana mencakup keamanan regional. Sejak terjadinya Revolusi Islam pada 1979, penolakan oleh Iran secara ideologis terhadap eksistensi Israel dan dukungannya terhadap proksi-proksi (e.g. Hezbollah di Lebanon dan Hamas di Gaza), telah menempatkan Iran sebagai ancaman strategis bagi Israel (Salami, 2025).

Iran, secara ideologis dan dalam doktrin politik luar negerinya, menolak untuk mengakui keberadaan Israel sebagai sebuah negara dan oleh karenanya, senantiasa mengupayakan segala cara untuk menghancurkan Israel (Ostovar, 2024). Adanya hal ini terlihat dari retorika dan pernyataan dari petinggi negara dan militer Iran, termasuk dalam hal ini dari Pemimpin Iran, Ali Khamenei bahwa Israel adalah “tumor” yang harus dibasmi, dan juga program-program militer Iran seperti pengembangan nuklir yang diduga sebagai senjata oleh Israel serta kelompokkelompok proksi yang disokong Iran yang disebut sebagai Poros Perlawanan yang mengancam dan sering terlibat

kontak fisik dengan Israel. Israel, dalam hal ini memandang dan merespons Iran pula sebagai ancaman terhadap keberlangsungan dan keamanan negaranya, sekaligus terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah. (Leiter, 2025). Israel dan Iran kemudian, sering terlibat dalam berbagai perseteruan, baik kontak senjata langsung atau melalui proksi-proksi, maupun non-fisik seperti peretasan, sabotase dan spionase. Adanya pengembangan dan pengayaan kandungan nuklir Iran yang dianggap oleh Israel sebagai senjata termasuk proksi-proksi Iran yang mengancam keamanan Israel, dijadikan oleh Israel sebagai suatu justifikasi dalam serangan-serangannya yang dialamatkan ke Iran, baik secara fisik seperti serangan udara dan serangan siber, maupun retorika dan pernyataan publik oleh petinggi-petinggi Israel. Sebagai sebuah kebijakan luar negeri Israel, perseteruan terbuka dengan Iran telah berlangsung sejak awal 1990-an, dimana perdana menteri Israel saat itu, Yitzhak Rabin mulai memberlakukan postur kebijakan luar negeri yang bersifat adversarial atau bermusuhan terhadap Iran (Menashri & Trita, 2007). Postur kebijakan luar negeri ini pun kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan Israel sampai pada saat penelitian ini ditulis.

Postur kebijakan luar negeri terhadap Iran yang bersifat adversarial ini diwujudkan dengan cara yang koersif. Cara yang koersif ini, kemudian dilakukan sebagai bentuk compellence dan deterrence terhadap Iran. Compellence dan deterrence terhadap Iran ini dilakukan oleh Israel sebagai upaya guna meminimalisir risiko terjadinya eskalasi konflik yang meningkat yang dapat berimplikasi dengan terwujudnya suatu perang terbuka berskala besar, disamping juga untuk menetralsir ancaman-ancaman ataupun

kapabilitas tempur, baik itu yang terkait dengan program nuklir Iran maupun proksi-proksinya (Eisenkot, 2019). Adapun penerapan dari strategi Compellence dan Deterrence terhadap Iran ini umumnya berupa aktivitas-aktivitas klandestin, juga serangan-serangan penghancuran berskala kecil, seperti pembunuhan Mohsen Fakhrizadeh selaku ilmuwan nuklir Iran, dan peledakan fasilitas Nuklir Natanz di Iran (Ostovar, 2024). Hal-hal seperti ini, oleh Israel secara resmi disangkal atau bahkan tidak mereka akui melakukannya. Aktivitas ini berlangsung sampai dengan pemerintahan perdana menteri Naftali Bennet di periode 2021 sampai 2022, dan sempat berlanjut ke masa awal pemerintahan ketiga Benjamin Netanyahu.

Pada masa pemerintahan Naftali Bennet, kebijakan luar negeri Israel terhadap Iran tidak tampak mengalami pergeseran ataupun perubahan dari strategi compellence dan deterrence, yang mana mengindikasikan keberlanjutan kebijakan dari periode sebelumnya. Israel di bawah pemerintahan Bennet tetap mempertahankan pendekatan militeristik untuk menghadapi ancaman dari proksi-proksi Iran dan untuk melemahkan dan menghambat perkembangan program nuklir Iran. Di bawah pemerintahan Bennet, Israel juga tetap menjaga hubungan kooperatif dengan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Joe Biden dengan tujuan untuk melawan ambisi Nuklir Iran, disamping untuk menghindari konfrontasi terbuka namun tetap menjalankan kebijakan yang agresif terhadap Iran (Kaye, 2022). Meski demikian, Israel tetap menunjukkan bentuk kontra dengan rencana AS untuk mengontrol program nuklir Iran melalui cara-cara diplomatis, yang dalam hal ini adalah rencana kembalinya AS kedalam Joint

Comprehensive Plan of Action (JCPOA), dan Israel tetap menganggap pendekatan militeristik dan pemberian sanksi ekonomi kepada Iran lebih efektif melawan ancaman dari Iran (Albarasneh, 2024).

Sejak desember 2022, Benjamin Netanyahu kembali untuk ketiga kalinya menjabat sebagai perdana menteri Israel. Netanyahu, pada periode awal kepemimpinannya, menunjukkan keberlanjutan pendekatan dan bentuk kebijakan luar negeri terhadap Iran, dari pemerintahan sebelumnya, yang mana dibuktikan dengan, diantaranya, penolakan Israel terhadap rencana AS untuk kembali kedalam JCPOA (Times of Israel, 2023), dan juga serangan udara ke Suriah yang menewaskan 2 anggota Garda Revolusi Iran pada Maret 2023 (Al Jazeera, 2023). Pasca serangan 7 oktober 2023 yang dilakukan oleh Hamas, Israel mengubah pandangan dan pendekatannya terhadap Iran (Lister, 2024). Dalam responsnya, Israel menganggap Iran terlibat dengan dasar bahwa Hamas adalah proksi daripada Iran (Diker, 2024). Israel beralih dari yang sebelumnya bercorak klandestin dan berorientasi deterrence dan compellence terhadap Iran, menjadi konfrontasi terbuka dan mengarah kepada bentuk perang fisik. Hal ini kemudian selaras dengan pernyataan PM Netanyahu dalam pidatonya pada Juni 2024 di Parlemen Israel; “berapapun harganya dan apapun caranya, kita akan menggagalkan upaya Iran untuk menghancurkan kita”. (Government of Israel, 2024).

Hal ini kemudian dipertahankan oleh Israel selama tahun 2024, dimana penelitian ini mengambil latar waktu. Adapun contoh dari adanya konfrontasi terbuka ini adalah serangan udara oleh Israel yang secara terang-terangan menyerang Konsulat Iran di

Suriah yang menewaskan 3 perwira tinggi Garda Revolusi Iran pada April 2024 (Associated Press, 2024).

Sebagai usaha penulis untuk mendapatkan pemahaman utuh dan melengkapi penelitian ini, penulis mengacu kepada 3 karya penelitian yang serupa dengan topik yang penulis kaji. Yang pertama ialah artikel karya Kaye pada tahun 2022 yang bertajuk “A New Israeli Approach to Iran?”. Pokok yang dibahas dalam artikel tersebut adalah bagaimana pada masa pemerintahan Bennet, Israel menjalankan kebijakan luar negeri terhadap Iran dengan melanjutkan pandangan dan pendekatan seperti pemerintahan pendahulu-pendahulunya.

Yang kedua ialah artikel karya Malik Waleed pada tahun 2024 yang bertajuk “Israeli Aggression: Perspectives, Policies, and Projected Scenarios”. Adapun pokok yang dibahas dalam artikel tersebut ialah bagaimana Israel menjustifikasi keadaan pasca serangan 7 oktober 2023 dalam usahanya mensubjugasi Palestina, bersamaan dengan proksi-proksi Iran seperti Hamas dan Hezbollah (Waleed, 2024)

Yang ketiga ialah artikel karya John Raine, et al., pada tahun 2024 yang bertajuk “Iran and Israel: Everything Short of War”. Adapun pokok yang dibahas ialah bagaimana Israel dan Iran melakukan konfrontasi terbuka namun, terdapat penghalang-penghalang yang membuat antar kedua belah pihak tidak mampu melaksanakan suatu perang skala massif. (Raine, Barry, Childs, Hinz, & Voo, 2024)

Adapun gap dari artikel pertama dengan penelitian penulis adalah artikel tersebut membahas tentang bagaimana kebijakan luar negeri Israel terhadap Iran dijalankan di

bawah pemerintahan Bennet, sedangkan penulis mengambil latar waktu pada masa pemerintahan ketiga Netanyahu.

Adapun gap dari artikel kedua dengan penelitian penulis adalah pada artikel tersebut hanya menjelaskan justifikasi oleh Israel dalam mensubjugasi Palestina dan proksi-proksi Iran, sedangkan penulis akan menjelaskan alasan-alasan yang mendorong Israel dalam mengubah kebijakan luar negerinya terhadap Iran pasca serangan 7 oktober.

Adapun gap dari artikel ketiga dari penelitian penulis adalah bahwa pada artikel dijelaskan bagaimana bentuk konfrontasi Israel terhadap Iran yang berlangsung pasca serangan 7 oktober melalui kapabilitas tempur masing-masing pihak, sedangkan penelitian dari penulis hendak menjelaskan bagaimana konfrontasikonfrontasi tersebut ialah pengejewantahan dari kebiakan luar negeri Israel terhadap Iran.

1.2. Rumusan Masalah

Guna memperjelas batasan dan fokus didalam penelitian ini, maka penulis merumuskan sebuah rumusan masalah, yakni “mengapa terjadi perubahan dalam kebijakan luar negeri Israel terhadap Iran pada tahun 2023 sampai 2024?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah sumbangsih akademis sekaligus wawasan tambahan bagi dunia akademik. Selain itu, penelitian ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana (S1) program studi

Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus daripada ditulisnya penelitian ini adalah guna menjelaskan terjadinya perubahan Kebijakan Luar Negeri Israel terhadap Iran pada tahun 2022 sampai 2024. Fokus daripada penelitian ini terletak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan dan juga bagaimana terjadinya perubahan tersebut sebagai akibat daripada sebab-sebab tersebut. Output daripada penelitian ini diharapkan turut memberi pemahaman bagi masyarakat umum mengenai perubahan kebijakan luar negeri Israel terhadap Iran.

1.4. Kerangka Pemikiran

1.4.1. Foreign Policy Change

Foreign Policy Change adalah sebuah teori yang menyajikan penjelasan sistematis mengenai proses berubahnya kebijakan luar negeri dari sebuah negara dalam menghadapi suatu isu internasional (Eidenfalk, 2006). Untuk membangun model yang dapat menjelaskan proses ini secara menyeluruh, Eidenfalk mengintegrasikan beberapa teori kebijakan luar negeri yang relevan. Hasilnya adalah sebuah model baru yang mencakup bagian-bagian yang sebelumnya tidak dielaborasi, menjadikannya lebih komprehensif dari pendekatan terdahulu.

Di antara bagian-bagian baru tersebut, terdapat konsep "sumber perubahan" (sources of change). Konsep ini mengkategorikan sumber pendorong perubahan ke

dalam dua ranah: pengaruh domestik—yang di dalamnya terdapat variabel media dan opini publik—serta pengaruh internasional yang terdiri atas faktor global dan regional. "Sumber-sumber perubahan" inilah yang menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan dalam merevisi kebijakan luar negeri mereka.

1.4.1.1. Analisis Faktor-faktor Domestik

Faktor-faktor domestik merupakan variabel krusial yang secara signifikan mempengaruhi dan memberikan tekanan bagi pemerintah untuk mengubah kebijakan luar negerinya. Oleh karena itu, para pemimpin harus memperhitungkan dinamika domestik dalam setiap perumusan kebijakan, sebab legitimasi dan keberlangsungan kekuasaan mereka sangat bergantung pada dukungan yang berasal dari publik di dalam negeri (Eidenfalk, 2006). Adapun menjadi penting untuk kemudian tidak mengabaikan faktor-faktor domestik yang mana hal tersebut menjadi penentu bagi pengambil kebijakan—dalam hal pemberian dan penggulingan kuasa. Adapun kemudian terdapat 5 komponen utama yang memengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri di tataran politik domestik, yakni, birokrasi, media, kelompok kepentingan, opini publik dan partai politik.

1.4.1.1.1. Birokrasi

Secara tradisional, birokrasi lebih sering dipersepsikan sebagai elemen penjaga stabilitas daripada sebagai pendorong perubahan. Kecenderungan ini disebabkan oleh sifat birokrasi yang operasionalnya terikat pada prosedur standar dalam sistem pemerintahan, yang pada gilirannya justru dapat menjadi penghambat saat suatu

negara hendak melakukan perubahan kebijakan. Hambatan ini muncul karena adanya preferensi di kalangan birokrat untuk mempertahankan status quo, sementara hanya sebagian kecil yang aktif mengadvokasi perubahan. Menurut Halperin (dalam Eidenfalk, 2006), upaya untuk mendorong perubahan dari dalam pun tidaklah mudah, sebab birokrat yang pro-perubahan harus melakukan kalkulasi yang cermat atas agenda yang mereka perjuangkan karena adanya batasan-batasan institusional.

1.4.1.1.2. Opini Publik

Opini publik dapat dimaknai sebagai respons, pemahaman, atau kepercayaan umum masyarakat luas terhadap suatu isu kebijakan. Opini publik memegang peranan penting, sebab pemerintah memerlukan dukungan rakyat untuk menjalankan kebijakannya dan untuk memastikan mereka tetap memiliki legitimasi saat pemilihan umum tiba. Akan tetapi, jika masyarakat merasa tidak puas, hal tersebut dapat memicu gelombang protes yang kuat. Tekanan dari publik ini pada akhirnya bisa mendorong pemerintah untuk merevisi atau mengubah total kebijakan luar negerinya (Eidenfalk, 2006).

1.4.1.1.3. Media

Peran media dalam dinamika perubahan kebijakan bersifat krusial karena fungsinya sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan publik. Oleh karena itu, pemerintah harus memperhitungkan media untuk memobilisasi dukungan publik atas kebijakan yang telah dirumuskan. Menurut Eidenfalk (2006), signifikansi media dalam mendorong perubahan kebijakan luar negeri dapat diidentifikasi melalui tiga fungsi

utamanya. Pertama, media bertindak sebagai pembentuk opini publik dengan cara menyebarkan informasi mengenai kebijakan pemerintah. Kedua, media berperan sebagai penyelidik (investigator) yang menyajikan temuan informatif kepada pemerintah dan publik, yang dapat memicu perubahan kebijakan. Ketiga, media berfungsi sebagai forum bagi aktor negara maupun non-negara untuk memberikan tekanan atau sebaliknya, meningkatkan legitimasi suatu kebijakan. Dengan demikian, pengaruh media dapat bersifat ganda: membangun dukungan publik atau justru menciptakan tekanan tambahan yang berpotensi menjatuhkan pemerintah.

1.4.1.1.4. Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan dapat dimaknai sebagai sebuah perkumpulan terorganisir yang memiliki tujuan spesifik dan secara aktif terlibat dalam aktivitas yang berkaitan dengan pemerintahan. Pengaruh entitas ini telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Karakteristik utama mereka adalah fokus pada isu-isu tunggal (single-issues) yang berhasil menarik perhatian publik. Fenomena ini kemudian menuntut pemerintah untuk memberikan respons yang lebih serius terhadap isu tersebut, karena jika diabaikan, pemerintah berisiko kehilangan posisi atau kepentingannya sebagai otoritas pembuat kebijakan.

1.4.1.1.5. Partai Politik

Adapun partai politik yang dalam konteks ini ialah partai-partai yang memiliki perwakilan di parlemen. Dukungan dari partai-partai ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah ketika hendak membuat atau mengubah kebijakan. Seperti yang dijelaskan

sebelumnya, pemerintah (atau birokrat) memiliki batasan, dan salah satu batasan terpenting adalah kebutuhan akan dukungan di parlemen. Pemerintah senantiasa mengandalkan dukungan dari partai politik sebagai pertimbangan utama saat merancang hingga mengesahkan sebuah kebijakan.

1.4.1.2. Analisis Faktor-faktor Internasional

Tataran politik internasional merupakan suatu sistem kompleks yang melibatkan interaksi antara negara, institusi internasional, dan entitas non-negara di berbagai jenjang. Guna menganalisis pengaruh faktor internasional terhadap terbentuknya kebijakan luar negeri, adalah penting untuk tidak hanya mengidentifikasi para aktor yang terlibat, tetapi juga memeriksa unsur-unsur seperti distribusi kekuasaan, norma-norma, serta peran lembaga. Identifikasi pengaruh internasional ini dapat diuraikan lebih lanjut ke dalam empat komponen utama: global, regional, hubungan bilateral, dan peran aktor non-negara.

1.4.1.2.1. Global

Faktor global merujuk pada perubahan-perubahan berskala besar dalam sistem politik internasional yang secara signifikan berdampak pada arah kebijakan luar negeri suatu negara. Sebuah peristiwa tunggal atau tindakan dari aktor besar dapat memicu perubahan fundamental dengan cara mengubah tatanan politik internasional, fungsi institusi global, hingga norma-norma yang telah mapan. Sebagai contoh, peristiwa 9/11 tidak hanya mendorong Amerika Serikat untuk meluncurkan kebijakan “Perang Melawan Teror” (War on Terror), tetapi juga secara drastis mempengaruhi sistem

politik dan keamanan di berbagai negara hingga saat ini. Oleh sebab itu, faktor global menjadi komponen vital dalam identifikasi pengaruh internasional.

1.4.1.2.2. Regional

Dampak dari suatu peristiwa internasional sering kali tidak hanya dirasakan di tingkat global, tetapi juga bergema kuat di tingkat regional. Institusi regional dan dinamika antar negara tetangga memiliki pengaruh penting dalam perumusan kebijakan luar negeri. Setiap kawasan memiliki tatanan unik yang dibentuk oleh kombinasi budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang berbeda antar negara. Konteks regional ini menciptakan serangkaian aturan dan norma tak tertulis yang harus dipertimbangkan oleh para pembuat kebijakan saat merumuskan langkah-langkah strategis mereka. Dengan demikian, faktor regional adalah elemen yang tidak dapat berdiri sendiri dan merupakan bagian integral dari analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri.

1.4.1.2.3. Bilateral

Faktor ini berfokus pada bagaimana hubungan langsung antara dua aktor atau lebih dapat mempengaruhi keputusan kebijakan. Hubungan yang dimaksud tidak terbatas pada relasi antarnegara, tetapi juga mencakup interaksi negara dengan aktor lain seperti institusi internasional. Dalam dinamika ini, seorang aktor dapat memanfaatkan daya ungkit (*leverage*) yang dimilikinya—seperti aliansi militer, ketergantungan ekonomi, atau ancaman sanksi—untuk menekan pihak lain agar mengadopsi atau menyesuaikan kebijakan luar negeri mereka sesuai dengan kepentingannya.

1.4.1.2.4. Aktor non-negara

Aktor non-negara adalah orang atau kelompok yang punya pengaruh besar terhadap keputusan sebuah negara, tapi mereka sendiri bukan bagian dari negara tersebut. Menurut (Pearlman & Cunnigham, 2012), ada lima jenis utama aktor nonnegara, antara lain yakni; Aktor Sub-Negara, yaitu kelompok yang berasal dari suatu negara yang mempunyai suatu pengaruh internasional, contohnya ialah korporasi multinasional. Kemudian terdapat Organisasi Antar-Pemerintah (IGO), yaitu kelompok yang tergabung dan didirikan melalui perjanjian. Kemudian terdapat Aktor Transnasional: Individu atau kelompok yang bergerak lintas negara dan tidak terikat pada satu negara saja, contohnya LSM internasional atau para pencari suaka. Kemudian terdapat Kelompok Politik Bersenjata: Kelompok yang memakai kekerasan untuk tujuan politik, seperti kelompok teroris. Yang terakhir ialah Kelompok Kriminal: Kelompok yang melakukan kejahatan lintas negara untuk mencari keuntungan, seperti mafia atau kartel.

Karena pengaruh mereka bisa mengganggu kondisi suatu negara, maka para pembuat kebijakan harus selalu mempertimbangkan keberadaan aktor-aktor non-negara ini.

1.4.2. Window of Opportunity

Proses perubahan kebijakan luar negeri tidak berlangsung secara mekanis semata-mata sebagai respons terhadap sources of changes. Terdapat faktor dari para key decision-makers dan persepsi mereka terhadap suatu isu, memegang peranan yang

sama pentingnya. Dalam konteks ini, Windows of Opportunity merujuk pada sebuah momentum strategis yang dimanfaatkan oleh aktor untuk melakukan perubahan kebijakan luar negeri. Momentum ini dapat terbuka ketika para aktor mengidentifikasi sebuah policy window, merasakan adanya tekanan signifikan dari sources of change, atau ketika mereka secara sadar, melalui persepsi pribadi, melihat adanya kesempatan untuk mendorong terjadinya perubahan melalui agenda politik tertentu.

1.5. Sintesa Pemikiran



Gambar 1 Sintesa

Penulis menyusun kerangka sintesa pemikiran berdasarkan studi kasus menggunakan landasan teori yang telah ditulis di atas. Berdasarkan bagan di atas, penulis hendak menjelaskan bagaimana kebijakan luar negeri suatu negara dapat berubah melalui faktor-faktor dan momentum. Penulis disini menyajikan faktor domestik dan faktor internasional yang mempengaruhi berubahnya suatu kebijakan luar negeri. Diantara faktor-faktor domestik tersebut anatara lain ialah birokrasi, opini publik, media, kelompok kepentingan, dan partai politik. Di satu sisi, faktor-faktor internasional tersebut ialah global, regional, bilateral, dan aktor non-negara. Keseluruhan faktor-faktor tersebut kemudian diutilisasi oleh para pengambil keputusan guna merespon suatu window of opportunity atau momentum kunci yang eksis dan dijadikan suatu landasan guna mengubah kebijakan luar negeri negara tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, maka, penulis mempergunakan bagan sintesa pemikiran diatas guna menganalisis perubahan kebijakan luar negeri Israel terhadap Iran tahun 2023-2024.

1.6. Argumen Utama

Menggunakan landasan teori perubahan kebijakan luar negeri yang dirumuskan oleh Eidenfalk, Israel dalam menjalankan kebijakan luar negerinya terhadap Iran mengalami perubahan yang terjadi pada periode tahun 2023 sampai pada 2024, bertepatan dengan masa pemerintahan ketiga perdana menteri Benjamin Netanyahu yang dimulai pada desember 2022. Selama masa awal pemerintahannya sebelum oktober 2023, Israel masih menjalankan strategi compellence dan deterrence terhadap

Iran. Adapun kemudian, merujuk kepada *sources of changes* sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Eidenfalk, maka, terdapat faktor internal atau domestik dari dalam Israel sendiri dan juga faktor eksternal atau internasional, ditambah suatu *window of opportunity* yang kemudian turut mengubah kebijakan Israel terhadap Iran. Mengenai opini publik di sini yang dimaksud adalah dari masyarakat Israel itu sendiri, yang mana diketahui secara kolektif memiliki rasa keterancaman atas berbagai hal yang dianggap mengancam, termasuk dalam hal ini ialah ancaman serangan dari Iran. Adanya bentuk insecurities dari Masyarakat Israel ini jugalah yang kemudian mendorong pemerintah Israel dalam posisi siaga menghadapi Iran. Mengenai media disini ialah media lokal Israel seperti *The Jerusalem Post* dan *Times of Israel*, yang selain sering diakses oleh masyarakat Israel, juga yang kemudian memberikan masukan atau kritikan kepada pemerintah Israel, yang mana turut membentuk persepsi bagi pemerintah Israel dalam menjalankan kebijakan luar negeri terhadap Iran. Adapun kelompok kepentingan dalam konteks domestik Israel disini ialah kelompok-kelompok *Zionis Revisionis* yang mana diketahui sering melakukan advokasi dari masyarakat kepada pemerintah Israel mengenai bagaimana Israel harus bersikap terhadap siapa yang dianggap musuh, yang dalam hal ini termasuk Iran. Adapun partai politik yang disinggung disini ialah partai politik yang menjadi kendaraan politik PM Netanyahu yakni Likud yang merupakan partai sayap kanan mayoritas, berikut koalisi-koalisinya, dan juga oposisi-oposisi dalam pemerintahan Israel. Mengenai birokrasi dalam konteks ini ialah pemerintahan Israel itu sendiri, yang dalam hal ini mencakup eksekutif; kabinet perang dibawah PM Netanyahu berikut kementerian Luar Negeri dan Pertahanannya juga kepala-kepala militer Israel dan legislatif, yakni parlemen Israel.

Berikutnya berkenaan dengan faktor-faktor internasional, dalam konteks bilateral, maka telah jelas bahwa yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Israel terhadap Iran ialah Iran itu sendiri, yang dianggap sebagai ancaman nyata terhadap keberlangsungan negara Israel. Pada tataran regional, maka dalam hal ini ialah negara-negara di Kawasan Timur Tengah yang sedikit banyak turut mempengaruhi berubahnya pendekatan Israel kepada Iran, seperti Lebanon, Suriah maupun Palestina. 3 aktor negara tersebut diketahui, selain sebagai negara tetangga yang berdekatan dengan wilayah Israel, juga 3 aktor pemerintahan negara tersebut adalah yang menaungi proksi-proksi daripada Iran, yang mana proksi-proksi tersebut seringkali melakukan interaksi dalam bentuk konflik dengan Israel. Pada tataran global, maka dalam hal ini ialah Amerika Serikat, yang eksistensinya sebagai hegemon dalam hal keamanan dunia turut menganggap Iran sebagai ancaman dan oleh karenanya juga, termasuk mendorong atau mempengaruhi Israel dalam merubah kebijakannya terhadap Iran. Yang terakhir, mengenai aktor non-negara, maka dalam hal ini dialamatkan kepada mereka yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, turut mempengaruhi berubahnya kebijakan luar negeri Israel terhadap Iran, yang dalam hal ini ialah Hamas di Gaza dan Hezbollah di Lebanon. Adapun kemudian masih didalam model analisis perubahan kebijakan luar negeri oleh Eidenfalk, maka terdapat window of opportunity atau momentum kunci dari terjadinya perubahan kebijakan luar negeri oleh suatu negara. Adapun dalam konteks Israel ini maka window of opportunity-nya ialah serangan 7 oktober 2023 yang dilaksanakan oleh Hamas yang dialamatkan kepada Israel. Adapun Hamas yang merupakan proksi daripada Iran kemudian, juga

mendorong Israel untuk mengubah pendekatannya terhadap Iran, yang dalam hal ini lebih berambisi untuk menghancurkan Iran.

1.7. Metodologi Penelitian

1.7.1. Tipe Penelitian

Secara metodologis, penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian eksplanatif. Pendekatan ini dipilih karena relevansinya dalam menelusuri dan memberikan eksplanasi terhadap proposisi kausal antarvariabel penelitian (Raihan, 2017). Sejalan dengan itu, kerangka eksplanatif, sebagaimana dijelaskan oleh Singarimbun dan Effendy, tidak hanya berfokus pada identifikasi hubungan sebab-akibat, tetapi juga mencakup verifikasi terhadap hipotesis yang telah